

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan gereja sebagai Lembaga keagamaan yang sakral dan berdasar standar moral tinggi yang memperkuat tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan dana. Salah satu contoh organisasi sektor publik adalah tempat peribadatan, termasuk gereja (Bastian,2010). Sebagai sebuah organisasi, gereja memerlukan berbagai sumber daya untuk menunjang pelayanannya, termasuk sumber daya dana. Adanya *stekholder* yang beragam dalam tubuh gereja menyebabkan pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, objektif, dan bertanggung jawab. Keberadaan gereja sebagai lembaga keagamaan yang sakral dan berdasar standar moral tinggi semakin memperkuat tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan dana. Gereja termasuk dalam jenis organisasi sektor publik yang tidak bertujuan mencari keuangan melainkan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial. Bastian (2010) menyatakan definisi organisasi sektor publik adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, seperti: Organisasi Pemerintah Pusat, Organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi Partai Politik Dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Yayasan, Organisasi Pendidikan Dan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Sekolah) Organisasi Peribadatan (masjid, gereja vihara, kuil). Sebagai organisasi nirlaba, gereja berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dana yang diperuntukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama jemaatnya dan para donator sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gereja serta sebagai wujud

pertanggungjawaban moral dan iman kepada Tuhan, sehingga untuk mendukung pelayanan gereja dalam hal pendanaan, jemaat dan para donator akan semakin yakin dan berkerelaan melakukannya. Kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dana gereja juga mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 yang merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap badan publik yang mendapat dana/sumbangan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas. Gereja merupakan badan publik karena memperoleh dana dari publik (umat/jemaat), sehingga gereja berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dana. Dalam pertanggungjawaban dana, gereja juga mempunyai otonomi (berdiri sendiri) dituntut untuk mengadakan pencatatan yang terpadu yang memungkinkan adanya pertanggungjawaban bagi para pelaksana keuangannya. Dalam mempertanggungjawabkan dana gereja mengacu pada tata gereja GMT. Menurut Wijaya (2016) gereja merupakan salah satu organisasi *non profit* yang memerlukan sistem informasi. Sistem yang baik tentunya akan mampu membuat efisiensi dan efektivitas kinerja pengelola gereja. Misalnya gereja yang pada awalnya menggunakan sistem pencatatan manual dengan kendala lamanya pencarian data kemudian menggunakan sistem pencatatan yang terkomputerisasi akan lebih cepat Ketika melakukan pencarian data. Salah satu alasan mengapa gereja juga harus mengikuti perkembangan teknologi adalah tuntutan pertumbuhan organisasi yang menyebabkan perlunya sistem baru yang mampu menyajikan informasi yang lebih efektif. Perkembangan organisasi gereja

menuntut dimilikinya sebuah *sistem database* dalam sistem informasinya yang mampu menangkap data yang semakin kompleks, sehingga hal ini akan mempermudah pengelompokan dan pengambilan data tersebut. Menurut Wijaya (2016) mengatakan bahwa jika sistem informasi baik, maka kesalahan, keterlambatan pencatatan informasi bisa diminimalkan. Artinya ketika sebuah gereja tersebut memiliki sistem informasi yang baik, maka pengelolaan informasi gereja tersebut akan menjadi baik pula.

Menurut Harahap (2016) sistem informasi akuntansi gereja dapat digunakan untuk mengelola data keuangan maupun data non keuangan gereja yang dapat disimpan dalam sebuah database. Penyimpanan data yang baik dan rapi juga akan membuat pencarian data menjadi lebih mudah. Dari sisi keuangan data dapat berupa pemasukan dan pengeluaran gereja. Pemasukan gereja dapat berupa kolekte mingguan, perpuluhan atau bulanan, kolekte khusus, dan donatur atau persembahan lainnya. Sedangkan pengeluaran gereja dapat berupa tunjangan untuk Pendeta, biaya rapat majelis gereja maupun komisi-komisinya, pembelian sarana gereja dan keperluan kegiatan, berbagai sumbangan dan biaya lain-lain yang bersifat khusus. Sementara dari sisi non keuangan data dapat berupa daftar jemaat yang dimiliki gereja, struktur organisasi dalam gereja dan dapat memberikan informasi tentang berbagai macam kegiatan yang dilakukan gereja. Dengan demikian sistem informasi sangat bermanfaat bagi gereja, dalam mengelola dan mengakses data-data keuangan maupun data-data non keuangan gereja. Sistem informasi pada perusahaan menghasilkan kesimpulan bahwa sistem informasi yang dirancang terhadap sebuah perusahaan dapat membuat kerja

karyawan perusahaan menjadi lebih efisien, hal ini dibuktikan bahwa aplikasi sistem dapat membuat proses pembuatan laporan-laporan menjadi lebih mudah dan cepat. Perancangan sistem informasi di dalam perusahaan terbukti lebih meningkatkan efisiensi kerja dalam perusahaan tersebut karena dapat mempermudah pencatatan laporan-laporan yang ada.

Permasalahan pertanggungjawaban dana gereja juga sering terjadi, contoh digereja penerimaan dana khusus yang dikumpulkan jemaat untuk tujuan khusus hanya dilaporkan jumlah pemasukannya, namun dalam penggunaan tidak dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada jemaat. Selain itu terdapat juga penerimaan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gereja yang hanya disampaikan secara lisan kepada jemaat jumlah bantuan tersebut sementara laporan penggunaan dana bantuan tersebut tidak dilaporkan secara tertulis, sementara gereja tersebut belum selesai pembangunannya seratus persen namun jumlah bantuan dana yang diberikan sudah tidak mencukupi untuk melanjutkan pembangunan sehingga pembangunan gerejapun diberhentikan. Masalah yang sering terjadi yaitu pemasukan dana dalam bentuk persembahan yang tidak dilaporkan sehingga ada jemaat yang harus mengkomplain kepada pengelola keuangan gereja baru dilaporkan. Salah satu organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah, ada beberapa kendala dalam mengimplementasikan sistim akuntansi sehingga berimplikasi pada ketidakhandalan dan ketidaktepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan yang menurut Halim, dkk (2010) meliputi: pimpinan SKPD (Surat Kerja Perangkat Daerah) sering tidak memahami secara utuh tentang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, kapasitas SDM

yang terbatas, komitmen yang tidak memadai, penguasaan tentang peraturan keuangan dan akuntansi yang rendah, keterbatasan fasilitas kerja yang terbatas atau perangkat pendukung (computer) dan prasarana tugas serta belum berjalannya koordinasi antara unit-unit yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan.

Pada penelitian sebelumnya, Handojo, (2016) tentang perancangan sistem informasi pada perusahaan menghasilkan kesimpulan bahwa sistem informasi yang dirancang terhadap sebuah perusahaan dapat membuat kerja karyawan perusahaan lebih menjadi efisien, hal ini dibuktikan bahwa aplikasi sistem dapat membuat proses pembuatan laporan-laporan menjadi lebih mudah dan cepat. Begitu pula dengan penelitian Perkasa (2017) mengatakan gereja sebagai salah satu organisasi nirlaba juga berkewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan yang diperuntukkan terutama bagi jemaatnya yang diharapkan dapat menunjukkan tingkat akuntabilitasnya tidak hanya pada Tuhan, tetapi juga kepada para donator dari pihak luar, sehingga dengan akuntabilitas yang memadai, maka semakin meyakinkan umat dan donator untuk mempercayakan bantuan amalnya kepada gereja. Namun ada kenyataan jemaat gereja secara tertulis pada warta jemaat dan sejenisnya.

Menurut Harahap (2016), ketertutupan ini sungguh sangat merugikan bagi jemaat karena bukan saja rentan terhadap penyimpanan melainkan juga merusak kepercayaan jemaat terhadap gereja. Menurut Musanti (2018) ada beberapa contoh permasalahan keuangan gereja yang sering terjadi korupsi dana pelayanan gereja oleh pengurus gereja, bukan pendeta, kolusi internal perangkat gereja dan oknum

di luar gereja untuk memanipulasi anggaran dan kegiatan pelayanan yang membutuhkan dana pada akhirnya menjadi beban kepada jemaat karena kesalahan perhitungan pada saat perencanaan anggaran.

Menurut Musanti (2018) ada beberapa akar dari permasalahan keuangan gereja yang sering terjadi bendahara bukan pelaku atau ahli dalam bidang keuangan, prioritas program berjalan terpaku pada rutinitas tradisi gereja dan keseimbangan neraca keuangan gereja. Selain yang dipaparkan sebelumnya, ada penyebab lain yang mengakibatkan terjadinya masalah pengelolaan keuangan di gereja.

Menurut Christiawan (2015) ada dua penyebab timbulnya permasalahan pengelolaan keuangan yang ada di gereja yaitu, sikap mengabaikan terhadap tidak adanya pertanggungjawaban keuangan yang jelas dan transparan atas modal-modal pengelolaan keuangan yang sudah tidak bisa lagi dipakai karena mengandalkan kepercayaan yang keliru, dan atas masalah-masalah keuangan yang sebenarnya diketahui, namun tidak diselesaikan secara tuntas dalam gereja adalah masalah pertanggungjawaban biasa terjadi karena memang disengaja, namun seringkali karena ketidaktahuan bagaimana mengelola keuangan secara professional dengan disertai pertanggungjawaban yang tansparan dan jelas. Untuk mengatasi masalah yang terjadi sebenarnya dapat dilakukan beberapa tindakan.

Menurut Kaban dan Ginting (2016) untuk mewujudkan pengelolaan/penatalayanan keuangan yang baik harus didukung dengan dua prinsip utama yaitu tansparansi dan akuntabilitas. Prinsip ini akan menjadi pegangan bagi pengelola keuangan (Ketua dan Bendahara) dalam penjabaran tindakan dan

langkah-langkah yang dilakukan baik dalam kegiatan penyusunan anggaran, penyelenggaraan administrasi/pembukuan, penerimaan/penggunaan dana maupun dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan harta benda. Semua pihak yang berkepentingan termasuk jemaat berhak mengetahui, mengawasi dan mengkritisi semua rangkain penggunaan anggaran. Standar akuntansi merupakan pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi, dikeluarkan oleh badan yang berwenang dan berlaku. Gereja adalah salah satu bagian dari organisasi nirlaba, gereja harus menyusun laporan keuangan untuk transparansi keuangan sehingga kondisi keuangan gereja dan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Diperlukan suatu sistem yang baik dan terstruktur agar segala jenis kecurangan dalam gereja yang menyangkut kecurangan keuangan dapat dicegah dan ditekan sekecil mungkin. Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah sistem pengendalian intern untuk mengatasi kecurangan-kecurangan tersebut. Laporan keuangan bulanan dan tahunan juga tidak terlepas dari sorotan *principal*. Laporan- laporan tersebut hanya menyajikan kondisi keuangan di akhir periode. *Principal* merasa bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bulanan dan tahunan masih terbatas, oleh sebab itu *principal* terus menyuarakan agar modal pelaporan keuangan bulanan dan tahunan diperbaharui dengan menyajikan informasi yang lebih komperhensif.

Gereja termasuk dalam jenis organisasi sektor publik yang tidak bertujuan mencari keuntungan melainkan usaha-usaha yang bersifat sosial. Bastian (2010) menyatakan definisi organisasi sektor publik adalah organisasi yang

menggunakan dana masyarakat. Sebagai organisasi nirlaba, gereja berkewajiban dan berkepentingan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dana yang diperuntukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama jemaatnya dan para donator sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan gereja serta sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan iman kepada Tuhan, sehingga untuk mendukung pelayanan gereja dalam hal pendanaan, jemaat dan para donator akan semakin yakin dan berkerelaan melakukannya. Kewajiban untuk menyusun nilai informasi pelaporan keuangan gereja juga mengacu pada undang-undang No 14 tahun 2008 yang merupakan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik (KIP). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa setiap badan publik yang mendapat dana atau sumbangan dari masyarakat mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas. Gereja merupakan badan publik karena memperoleh dana dari publik (umat atau jemaat), sehingga gereja berkewajiban untuk menyusun pelaporan keuangan gereja.

Permasalahan nilai informasi pelaporan keuangan gereja juga sering terjadi, contoh di gereja ini penerimaan dana khusus yang dikumpulkan jemaat untuk tujuan khusus hanya dilaporkan jumlah pemasukannya, namun dalam penggunaan tidak dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kepada jemaat. Selain itu terdapat juga penerimaan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gereja yang hanya disampaikan secara lisan kepada jemaat jumlah bantuan tersebut sementara laporan penggunaan dana bantu tersebut tidak dilaporkan secara tertulis, sementara gereja tersebut belum selesai penggunaannya



serratus persen namun jumlah bantuan dana yang diberikan sudah tidak mencukupi untuk melanjutkan pembangunan sehingga pembangunan gereja pun diberhentikan. Masalah yang sering terjadi juga yaitu pemasukan dana dalam bentuk persembahan yang tidak dilaporkan sehingga ada jemaat yang harus mengkomplein kepada pengelolaan keuangan gereja baru dilaporkan.

Dalam pelaporan keuangan gereja juga mempunyai otonomi (berdiri sendiri) yang berarti dituntut untuk mengadakan pencatatan yang terpadu yang memungkinkan adanya pertanggungjawaban bagi para pelaksana keuangannya. Tata gereja merupakan suatu landasan berorganisasi gereja, yang meliputi beberapa hal mendasar diantaranya nama, tempat kedudukan, pengakuan iman, azas, tujuan, usaha, keanggotaan, persidangan, pengelolaan keuangan, Kerjasama dan penerimaan anggota, serta perubahan dan pengesahan tata dasar. Dalam nilai informasi pelaporan keuangan, gereja mengacu pada tata gereja GMIT. Pada kenyataannya tata gereja tidak ditampilkan bentuk pertanggungjawaban dana yang harus dibuat, namun, sesuai data yang diperoleh dikantor sinode GMIT bagian keuangan, sebenarnya bentuk nilai informasi pelaporan keuangan GMIT sudah ada tapi pelaksanaannya di gereja-gereja GMIT Klasis Pantar Timur belum maksimal sehingga nilai informasi pelaporan keuangan GMIT dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kemauan gereja masing-masing.

Namun, kendala yang dialami GMIT Klasis Pantar Timur ialah tidak adanya media yang dapat menyampaikan informasi secara cepat dengan waktu yang relatif singkat. Gereja masih mengantarkan laporan ke GMIT Klasis Pantar Timur serta banyak jemaat yang tidak mengetahui informasi terbaru seperti jadwal

ibadah, keadaan sinode terbaru, jumlah pendeta, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat menjangkau semua jemaat dan anggota Sinode GMIT Klasis Pantar Timur dengan mudah.

Oleh karena itu nilai informasi dapat menjadi alat bantu untuk memberikan kemudahan penyampaian informasi terbaru kepada jemaat tentang keadaan sinode dan jadwal ibadah. Selain itu, penyampaian laporan bulanan atau tahunan dari tiap- tiap gereja menjadi lebih mudah.

Kualitas sumber daya manusia, perangkat pendukung dan motivasi merupakan beberapa faktor yang menentukan kemampuan penyusunan pelaporan keuangan gereja GMIT yang tepat bagi gereja untuk memajemen kegiatan termasuk mengelola keuangannya salah satu organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah, ada beberpa kendala dalam mengimplementasikan sistem akuntansi sehingga berimplikasi pada ketidak handalan dan ketidak tepatan waktu dalam menghasilkan laporan keuangan yang menurut Halim, dkk (2010) meliputi: pimpinan SKPD sering tidak memahami secara utuh tentang tugas, wewenang dan tanggungjawabannya, kapasitas SDM yang terbatas, komitmen yang tidak memadai, penguasaan tentang peraturan keuangan dan akuntansi yang rendah, keterbatasan fasilitas kerja yang terbatas atau perangkat pendukung (komputer) dan prasarana tugas serta belum berjalannya koordinasi antara unit-unit yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian sebelumnya seperti tersebut di atas maka penulis bermotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pada Gereja-Gereja Gmit Klasis Pantar Timur”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tidak adanya media yang dapat menyampaikan informasi secara cepat dengan waktu yang relatif singkat. Gereja masih mengantarkan laporan ke Sinode GMTI Klasis Pantar Timur serta banyak jemaat yang tidak mengetahui informasi terbaru seperti jadwal ibadah, keadaan sinode terbaru, jumlah pendeta, dan lain-lain.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka persoalan penelitian ini adalah:

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan?
3. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan persoalan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

3. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat akademik**

Kegunaan secara akademik dari penelitian ini bagi civitas akademik adalah Universitas Kristen Artha Wacana diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya tentang pelaporan keuangan serta bahan teori lainnya dan praktik nyata.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran nyata sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pada Gereja Gmit Klasis Pantar Timur. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.